

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

- Araf, et. Al 2007 *Reformasi Peradilan Militer Indonesia*, Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor , Jakarta.
- Bowyer, R 2004, *Dictionary of Military Terms*, Bloomsbury Publising Ptd, London.
- Department of Defence, 1950, *The Officer's Guide: A Ready Reference on Customs and Correct Procedures Which Pertain to Commissioned Officers of the Army of the United States*, 16<sup>th</sup> Edition, The Millitary Service Publising Company, Pensinsylvania.
- Department of the Army 1987, *Trial Procedure*, DC: Headquarters Department of the Army, Issue Number 1, Washington.
- Department of the Army, 1986, *Criminal Law Deskbook, Jurisdiction, Charlottesville*, Criminal Law Division, The Judge Advocate General's School Army, Virginia.
- Dr H. Salim HS. SH,MS., Erlies Septiana Nurbani, SH., LLM 2014, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, H 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Manan, B 1993, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke Undang-Undang 1945,*” dalam “ *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali Ke UUD 1945*”, Cet.1, disunting oleh Sri Soemantri & Bintan R Saragih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia 1999, *TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi, Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa*, CV.JASA BUMA, Jakarta.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2000, *Sejarah TNI (1945-1949), Jilid I*, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Jakarta.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2000, *Sejarah TNI (1945-1949). Jilid II*, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Jakarta.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2000, *Sejarah TNI (1945-1949). Jilid III*, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Jakarta.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2000, *Sejarah TNI (1945-1949). Jilid IV*, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Jakarta.

- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2000, *Sejarah TNI (1945-1949). Jilid V*, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Jakarta.
- Milis, Walter,cs. Arms & The State 1958, *Civil Military Elements In National Policy*, The Twentieth Century Fund, New York.
- Moch, FS 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung.
- Moch, FS 2006, *Peradilan Militer di Indonesia*,Cet.I, Mandar Maju, Bandung.
- Perguruan Tinggi Hukum Militer 1982, *Himpunan Data Pendidikan Tahun 1952-1982, Akademi Hukum Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer di Jakarta*, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta.
- Reksodiputro, M 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Cet.2*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Said, A 2001, *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, kini dan Kelak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Hukum Militer 1998/1999, *Buku Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer T.A.*, STHM, Jakarta.
- Sianturi, SR 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia.Cet.I*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Sjarif, A 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia, Cet.I*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soegiri 1976, *Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV.Indra Djaya, Jakarta.

## **2. Artikel dan Karya Ilmiah :**

- Badan Pembinaan Hukum Markas Besar TNI 1994, *Sejarah Singkat Hari Jadi dan Arti Pusara Babinkum ABRI*, Jakarta.
- Defense Institute of International Legal Studies, “ *Military Justice codes and the Development of the US military Justice System*” Bahan Kuliah dalam rangka mengikuti Internasional Military Law Development Program & Internasional Law of Military Course,Newport 10 April-Juni 2006
- Djasri Marin.”*Peradilan Militer Saat ini*” Makalah Workshop Peradilan Militer, Menuju Sistem Peradilan Militer Yang sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI, Jakarta;Dephan RI-Kedutaan Besar Jerman,FRR Law Office, Hotel Salak Bogor,27-29 Maret 2006

Hikmahanto Juwana. *“Wacana Kemenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development”* (Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer, 15 November 2006)

Maria Farida Indarti. *“Pemahaman tentang Undang-undang Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, (Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum fakultas hukum Universitas Indonesia, Depok, 28 Maret 2007)”*

Shils, Edward. *“The Military in the Political Development of the new state dalam buku “The Role of the Military in Underdeveloped Countries, edited by Jhon J. Jhonson, New Jersey Princenton University Press. 1967”*

Sihombing, PLT. *“Perbandingan Sistem Peradilan Militer”* Makalah pada Penataran Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional bagi Perwira Jajaran Peradilan Militer TNI, Kerja sama antara Dephan-FRR-Kedutaan Besar Kanada di Medan-Denpasar-Ujung Pandang, Januari-Maret 2007

Susanto, B 2006, *Mengkaji Usulan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer*, Makalah dipresentasikan dalam Workshop Peradilan Militer, Jakarta.

### 3. Majalah Ilmiah :

Agustinus PH. *“Implikasi Yuridis, Dampak Sosiologi dan Kendala Sistem Penundukan Prajurit TNI ke Peradilan Umum”*, dalam Jurnal Hukum Militer, Jakarta, Vol.001 Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006

— — — — —, *“Prospeksi dan Urgensi acara Pemeriksaan Koneksitas”* dalam Jurnal Hukum Militer, Vol.1 Nomor 2 Agustus 2007, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007

Buaton, Tiarsen *“Peradilan Militer di Amerika Serikat”* dalam Jurnal Hukum Militer Vol.001 Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006

— — — — —, *“Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”* dalam Jurnal Hukum Militer, Vol.1 Nomor 2 Agustus 2007, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007

Susiani. *Peradilan Militer di Indonesia Pasca Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI* dalam Jurnal Hukum Militer Jakarta Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2006

Tambunan, A.S.S *“Hubungan Seorang Perwira dengan Hukum”* dalam majalah hukum Cakra Vijaya Tahun ke-VI No.1 tanggal 30 Mei 1965

#### 4. Tesis Buku dan Data/Sumber Yang Tidak Diterbitkan :

Direktorat Hukum Angkatan Darat, Laporan Pelaksanaan Litbang TA. 2008 tentang Kesiapan Prajurit tunduk pada Peradilan Umum dalam hal melakukan Tindak Pidana Umum, Jakarta 30 Oktober 2008.

Tambunan,A.S.S. "*Tentang Peradilan Militer*", Jakarta Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2006.

--- " *Beberapa catatan yang berhubungan dengan RUU Peradilan Militer dan Keodituran Militer*", Makalah disampaikan dalam rangka dengar pendapat umum dengan Fraksi ABRI dan Fraksi KPDPR RI, Februari 1997.

Wahyoedho Indrajit. "*Prospek Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Thesis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2002.

#### 5. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan :

Departemen Pertahanan Keamanan, Badan Pembinaan Hukum ABRI, *Petunjuk tentang Tata Laksana Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer, (Skep Kababinkum ABRI Nomor Skep-144/XII/1982)*, Jakarta 15 November 1982.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretaria Jenderal MPR RI, 2002.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Jakarta: Sekretaria Jenderal MPR RI, 2002.

--- "Undang-Undang tentang Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, Diumumkan pada 8 Juni 1946.

--- "Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946, Diumumkan pada 8 Juni 1946.

--- "Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Diumumkan pada 11 November 1946.

--- "Undang-Undang Darurat tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958, LN nomor 1 Tahun 1958, TLN 1493.



— — — — — “ Undang-Undang tentang Menetapkan Undang-undang Darurat tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) sebagai Undang-undang Federal, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, diumumkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 1950.

— — — — — “ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

— — — — — “ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia..

Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/4/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tentang *Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta Mabes TNI , 18 April 2007

— — — — — Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta Mabes TNI, 10 Agustus 2005.

— — — — — Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang *Atasan Yang Berhak Menghukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta Mabes TNI, 10 Agustus 2005.

— — — — — Surat Keputusan Kepala Pembinaan Hukum ABRI , Nomor Skep/186/X/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer, Jakarta, Mabes ABRI, 3 Oktober 1990.

